BAB V

KESIMPULAN

Pada awal-awal kemerdekaan, Indonesia banyak dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang terjadi. Kembalinya Belanda ke Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan Pemerintahan Kolonialnya di Republik Indonesia menyebabkan banyaknya pergolakan-pergolakan yang semuanya itu dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Banyak strategi yang dilakukan Republik Indonesia ketika Belanda melancarkan taktinya untuk menguasai kembali Indonesia dengan cara blokade.

Stragei-strategi yang ditempuh oleh Indonesia salah satunya yakni mencetak ORI. Akan tetapi, Belanda berhasil menguasai beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Akibatnya, pendistribusian ORI tidak merata ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Kurangnya jumlah ORI yang dibutuhkan untuk kegiatan pemerintahan, logistik militer dan masalah ekonomi menjadikan Pemerintahan Provinsi Sumatera mengeluarkan kebijakan untuk menerbitkan uang daerahnya. Uang Provinsi Sumatera ini disebut dengan ORIPS yang diterbitkan atas maklumat Gubernur T. Mohammad Hassan No. 92/K.O Tanggal 8 April 1947.

Akan tetapi, karena terjadinya Agresi Militer Belanda I menjadikan tersendatnya pencetakan ORIPS ini. Pencetakkan yang semula di Medan pindah ke Pematang Siantar hingga pada akhirnya ke Bukit Tinggi. Adanya kebutuhan uang yang tinggi dalam transaksi menyebabkan banyak daerah di Sumatera

berinisiatif untuk mencetak uang daerahnya, salah satunya adalah Kabupaten Asahan.

Latar belakang dicetaknya ORIDA Asahan merupakan suatu kebutuhan untuk membangun kembali Pemerintahan Sipil Kabupaten Asahan di Bandar Pulau yang sebelumnya di Tanjung Balai, karena adanya Agresi Militer Belanda I Tanjung Balai yang merupakan pusat awal Pemerintahan Kabupaten Asahan berhasil dikuasai oleh tentara Belanda. Dicetaknya ORIDA Asahan ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik pejuang-pejuang yang tengah menghadapi pasukan tentara Belanda, membiayai kebutuhan hidup masyarakat-masyarakat yang ikut mengungsi bersama Pemerintah ke Bandar Pulau dan untuk membiayai gaji-gaji karyawanan perkebunan guna meningkatkan hasil produksi perkebunan-perkebunan yang masih bisa dikuasai oleh Republik.

Pencetakan ORIDA awalnya dilakukan di Bandar Pulau tepatnya di Rumah Pegadaian Bandar Pulau. Dimana ketika itu Bupati Abdullah Eteng mengintruksikan kepada H. A. Dahlan untuk menukarkan gambir sebanyak 1 Ton ke Rantau Prapat dengan bahan-bahan untuk mencetak ORIDA Asahan seperti kertas dan tinta. Pencetakan ini dimulai pada pertengahan Agustus 1947 dengan menggunakan alat Hand Press yang sebelumnya dibuat terlebih dahulu klisenya yang terbentuk dari timah hitam. Emisi 21 Agutus 1947 ini terdiri dari nominal Rp. 10 SEN ORIPS, Rp. 50 SEN ORIPS, Rp. 1 ORIPS, Rp. 2^{1/2} ORIPS, Rp. 5 ORIPS, Rp. 10 ORIPS, Rp. 25 ORIPS, Rp. 50 ORIPS, Rp. 100 ORIPS, Rp. 2.500 ORIPS dan Rp. 100.000 ORIPS. ORIDA Asahan ini hanya berlaku di wilayah Kabupaten Asahan. Sementara untuk transaksi antar daerah menggunakan cara

barter. Pemberlakuan ORIDA Asahan ini menjadi pemecah masalah ketika ORI dan ORIPS tidak tersebar ke daerah-daerah dan merupakan salah satu cara untuk menandingi uang NICA yang sengaja diedarkan oleh Pemerintahan Belanda. Pencetakan ini juga pada selanjutnya diijinkan oleh Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1947 Tanggal 26 Oktober 1947.

Berhasilnya dikuasai Bandar Pulau dan disepakatinya Perundingan Renvile menjadikan Belanda merasa berhak untuk menguasai daerah tersebut berdasarkan garis Van Mook. Akibatnya, pindahnya Pusat Pemerintahan Sipil Kabupaten Asahan dari Bandar Pulau ke Pulau Raja. Pentingnya keberadaan Pemerintahan Sipil merupakan suatu usaha bahwa keberadaan Republik masih ada. Ketika Pemerintahan Darurat dibangun di Pulau Raja, dicetak uang kembali. Abdullah Eteng yang ketika itu masih menjadi Bupati Kabupaten Asahan memberikan intruksi untuk mengeluarkan uang Mandat Istimewa Bupati Kabupaten Asahan.

Pencetakan uang Mandat Istimewa Bupati Kabupaten Asahan ini berdasarkan Maklumat Jawatan Keuangan Kabupaten Asahan No. 10/1948-K/O Tanggal 7 Februari 1948. Pencetakannya menggunakan Mesin Cetak Stensil, bedanya pada uang Mandat Istimewa Bupati Kabupaten Asahan ini menggunakan tulisan ketikan mesin ketik yang kemudian diperbanyak dengan Mesin Cetak Stensil yang jika sekarang ini dicetak di Desa Tunggul 45 (perumahan pondok Afdeling III PTPN IV (Persero)). Mandat Istimewa Bupati Kabupaten Asahan ini terdiri dari nominal Rp. 500 ORIPS, Rp. 2.500 ORIPS, Rp. 5.000 ORIPS, Rp.

20.000 ORIPS, Rp. 50.000 ORIKA, Rp. 100.000 ORIKA dan Rp. 250.000 ORIKA. Mandat Istimewa Bupati Kabupaten Aahan ini juga merupakan suatu bukti keloyalitasan dari masyarakat Asahan yang tetap setia berada dalam Negara Republik Indonesia.

Adanya uang palsu yang sengaja diedarkan oleh Belanda dan tengkulaktengkualak luar negeri mempengaruhi keberadaan ORIDA Asahan ini. Karena bahan dan sulitnya bertransaksi dengan daerah lain menyebabkan keberadaan ORIDA Asahan dalam penggunaannya tidak bertahan lama. Ketika Pemerintahan RIS terbentuk pada tahun 1950 dikeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan uang baru yang resmi pengganti ORI dan beberapa ORIDA yang telah beredar diseluruh wilayah RIS.

